



**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

IRA DAMAYANTI HARAHAP

NIM. 19 402 00075

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

OLEH :

IRA DAMAYANTI HARAHAHAP

NIM. 19 402 00075

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

Oleh:

IRA DAMAYANTI HARAHAP
NIM. 19 402 00075

Pembimbing I

Delima Sari Lubis, M.A
NIP.19840512 2014 03 2002

Pembimbing II

Rini Hayati Lubis, M. P
NIP.19870413 2019 03 2011

**PROGAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **Ira Damayanti Harahap**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 24 Juli 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad
Addary Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

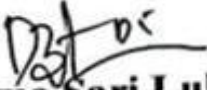
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ira Damayanti Harahap** yang berjudul **"Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Sumatera Utara"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar *Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah* pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu , kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Delima Sari Lubis, M.A
NIP.19840512 2014 03 2002

PEMBIMBING II


Rini Hayati Lubis, M.P
NIP.19870413 2019 03 2011

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ira Damayanti Harahap**
NIM : **19 402 00075**
Fakultas/Prodi : **Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Sumatera Utara**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 24 Juli 2023

yang Menyatakan,



Ira Damayanti Harahap
NIM. 19 402 00075

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ira Damayanti Harahap
NIM : 19 402 00075
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Sumatera Utara”**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 24 Juli 2023

Menyatakan,



Ira Damayanti Harahap
NIM. 19 402 00075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Ira Damayanti Harahap
NIM : 19 402 00075
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto,
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara

Ketua,

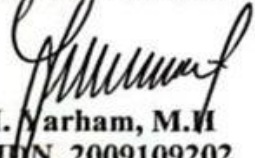

Delima Sari Lubis, MA
NIDN. 2012058401

Sekretaris,



Sry Lestari, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2005058902

Anggota


Delima Sari Lubis, MA
NIDN. 2012058401


M. Farham, M.H
NIDN. 2009109202


Sry Lestari, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2005058902


Adanan Murroh Nasution, M.A
NIDN. 2104118301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat, 28 Juli 2023
Pukul : 14.00 WIB s/d 16.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus / 74,75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,83
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO,
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
SUMATERA UTARA**

NAMA : IRA DAMAYANTI HARAHAP

NIM : 19 402 00075

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 9 Agustus 2023
Dekan,

Ira Damayanti Harahap, S.H.I., M.Si. ✓
08182009011015



ABSTRAK

Nama : Ira Damayanti Harahap

Nim : 19 402 00075

Judul Skripsi : Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara.

PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah merupakan dua variabel yang memiliki hubungan fungsional. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan daerah. Tapi saat PDRB meningkat PAD mengalami penurunan. Sebagaimana yang terjadi di kota Padangsidempuan pada tahun 2017 diperoleh data PDRB sebesar 3.830.320 dan mengalami kenaikan di tahun 2018 menjadi 4.038.930 sedangkan pertumbuhan PAD pada tahun 2017 sebesar 109.640.420,00 dan mengalami penurunan ditahun 2018 menjadi 75.063.575,00. Hal tersebut juga terjadi di daerah-daerah yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Hal ini tidak sesuai dengan teori. Pajak daerah dan Retribusi daerah juga mengalami hal demikian. Dapat dilihat data Pajak Daerah tahun 2017 sebesar 15.653.315 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 18.389.004 di kota Padangsidempuan. Hal tersebut juga terjadi pada Retribusi Daerah dimana pada tahun 2017 data retribusi daerah sebesar 9.044.995,00 dan mengalami kenaikan menjadi 9.385.099,00. Sedangkan pertumbuhan PAD pada tahun 2017 sebesar 109.640.420,00 dan mengalami penurunan ditahun 2018 menjadi 75.063.575,00. Hal ini bertentangan dengan konsep Pendapatan Asli Daerah. Apabila pajak daerah dan retribusi daerah mengalami peningkatan maka seharusnya PAD juga mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu ekonomi makro. Sehubungan dengan itu, pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan ekonomi makro khususnya mengenai PDRB, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Sumatera Utara, dengan jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 30 yang terdiri dari enam Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dari tahun 2017-2021 dengan menggunakan data panel. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan bantuan program *Eviews 9*.

Hasil dari estimasi penelitian ini dengan uji t adalah PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah. Serta pajak daerah yang tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dan retribusi daerah yang tidak memiliki pengaruh terhadap Pendapatan asli daerah. Dari hasil uji F dapat dilihat bahwa variabel PDRB, Pajak daerah dan Retribusi daerah secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di Sumatera Utara.

Kata Kunci : Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, yang senantiasa mencurahkan kelapangan hati dan kejernihan pikiran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam peneliti panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat kelak.

Untuk menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas akhir yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Skripsi ini berjudul **“PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI SUMATERA UTARA”**

Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan, baik yang bersifat material maupun inmaterial, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Serta Bapak Dr. H. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Rukiah Lubis, S.E., M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, serta Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A sebagai Kepala Program Studi Ekonomi Syariah dan Rini Hayati Lubis, MP selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah, serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidimpuan.

4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A sebagai dosen pembimbing I, saya ucapkan banyak terimakasih yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan, semangat, bimbingan dan pengarahan dalam penelitian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah ibu berikan.
5. Ibu Rini Hayati Lubis, M.P sebagai dosen pembimbing II, saya ucapkan banyak terimakasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah ibu berikan.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., SS., M.Hum selaku Kepala UPT Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.
8. Teristimewa kepada keluarga tercinta (Ayahanda Parlaungan Harahap dan Ibunda tercinta Nuriban Siregar) yang telah membimbing dan selalu berdoa

yang tiada henti-hentinya, serta berjuang demi anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang di harapkan. Terimakasih doa dari Kakak dan abang (Sarifah Hannum Harahap, Lismala Dewi Harahap dan Ahmad Swandy Pulungan) dan tak lupa juga khususnya untuk keponakan tercinta (Risa Arin Pulungan) yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberikan dukungan moral dan material demi kesuksesan Peneliti. Beserta Do'a dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.

9. Serta teman-teman seperjuangan di Ekonomi Syariah-2 angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terutama untuk sahabat-sahabat saya Hanya Sebatas Dunia Dedek Ayu Priyanka, Nurhayati, Novia Java Romadhin, Maharani Ubadiyah Siburian, Septi Khairani Siregar, Risna Wahyuni, Dedek Apriani, Putri Martondi dan sahabat lainnya yang telah memberikan dukungan serta bantuan, semangat dan doa kepada peneliti agar tidak putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan terima kasih juga untuk persahabatan dan diskusinya selama ini serta pihak-pihak yang tidak dapat saya tulis satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki peneliti serta kemampuan peneliti yang

jauh dari cukup. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi dan melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Padangsidempuan, 24 Juli 2023

Peneliti,

IRA DAMAYANTI HARAHAHAP

NIM. 19 402 00075

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dengan sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian konsonan dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf sekaligus tanda. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. *Tajwid*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Defenisi Operasional Variabel	10
F. Tujuan Penelitian	11
G. Manfaat Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Kerangka Teori	15
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	15
a. Defenisi Produk Domestik Regional Bruto	15
b. Produk Domestik Regional Bruto Dalam Islam	19
2. Pajak Daerah	21
a. Pengertian Pajak Daerah	21
b. Macam- Macam Pajak Daerah	21
c. Pajak Dalam Islam	23
3. Retribusi Daerah	24
a. Pengertian Retribusi Daerah	24
b. Jenis-Jenis Retribusi Daerah	24
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	26
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	26

b. Instrument Pendapatan Asli Daerah	27
c. Pendapatan Asli Daerah Dalam Islam	31
B. Penelitian Terdahulu	33
C. Kerangka Pikir	35
D. Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
B. Jenis Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Populasi dan Sampel	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
1. Model Estimasi Regresi Data Panel	40
a. <i>Common Effect Model</i>	40
b. <i>Fixed Effect Model</i>	40
c. <i>Random Effect Model</i>	41
2. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel	41
a. Uji <i>Chow</i>	41
b. Uji <i>Hausman</i>	41
c. Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (Uji LM)	42
3. Uji Normalitas	42
4. Uji Hipotesis	42
5. Analisis Regresi Berganda	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara	45
B. Gambaran Umum Variabel Penelitian	46
1. Pendapatan Asli Daerah.....	46
2. Produk Domestik Regional Bruto	47
3. Pajak Daerah	48
4. Retribusi Daerah	49
C. Hasil Penelitian	50
1. Model Estimasi Regresi Data Panel Dan Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel	50
a. <i>Common Effect Model</i>	50
b. <i>Fixed Effect Model</i>	51
c. <i>Random Effect Model</i>	52
2. Uji Normalitas	56
3. Uji Hipotesis	56

a. Uji Parsial	56
b. Uji Simultan	58
c. Uji Koefisien Determinasi	59
4. Analisis Regresi Berganda	59
D. Pembahasan Hasil Penelitian	61
1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah	61
2. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	62
3. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	64
4. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	66
E. Keterbatasan Penelitian	67
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

A. Tabel I.1 Data Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021	2
B. Tabel. I.2 Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah) kabupaten/Kota Di Sumatera Utara 2017-2021	3
C. Tabel I.3 Data Pertumbuhan Pajak Daerah (Juta Rupiah) Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2017-2021	5
D. Tabel I.4 Data Pertumbuhan Retribusi Daerah (Juta Rupiah) Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2017-2021	7
E. Tabel I.5 Defenisi Operasioanl Variabel	10
F. Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	33
G. Tabel IV.1 <i>Common Effect Model</i>	50
H. Tabel IV.2 <i>Fixed Effect Model</i>	51
I. Tabel IV.3 Uji <i>Chow</i>	52
J. Tabel IV.4 <i>Random Effect Model</i>	53
K. Tabel IV.5 Uji <i>Hausman</i>	54
L. Tabel IV.6 Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	55
M. Tabel IV.7 Uji Normalitas	56
N. Tabel IV.8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	57
O. Tabel IV.9 Uji Parsial (t)	58
P. Tabel IV.10 Uji Simultan (F)	59
Q. Tabel IV.11 Hasil Analisis Regresi Berganda	60

DAFTAR GAMBAR

A. Gambar 2.1 Kerangka Pikir	35
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah dengan baik serta kepentingan daerah itu sendiri. Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk bisa mengatur urusan pelayanan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan undang-undang. Dengan adanya UU. No.33 Tahun 2014 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah “Pendapatan Asli daerah atau PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan”. Pendapatan Asli Daerah didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah akan memberikan kontribusi yang besar untuk realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹

Sebagian besar daerah masih belum dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah atau bahkan penerimaan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Daerah menganggap bahwa rendahnya PAD sebagai akibat dari ruang gerak daerah yang terbatas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan

¹ Bayu Rizaldi, Ahmad Guspul, Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, PDRB, Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks-Karesidenan Kedu 2014-2018, dalam *Journal Of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, Vol. 3, No.1, Oktober 2021, Hlm. 9.

retribusi daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009. Daerah melihat banyak jenis dan objek pajak serta retribusi yang masih dapat diterapkan tetapi tidak diperbolehkan oleh Undang-undang.² Dapat dilihat dalam tabel 1.1 pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di beberapa Kabupaten/kota Di Sumatera Utara mengalami fluktuasi.

Tabel I.1
Data Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021

n o	Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Medan	17.380.841 ,05	6.362.045, 15	18.296.658 ,82	15.098.306 ,71	19.065.121 ,89
2	Padangsidimp uan	109.640.42 0	75.063.575	89.335.533	16.238.176 ,99	59.865.657 ,76
3	Sibolga	10.367.220	11.428.041	69.311.240	79.509.420	76.263.870
4	Mandailing Natal	80.581.688 ,94	84.809.923 ,5	98.758.815 ,33	90.454.777 ,18	14.451.514 ,68
5	Asahan	12.369.489 ,86	14.297.203 ,98	14.964.284 ,04	15.930.833 ,3	13.485.935 ,14
6	Tapanuli Selatan	10.472.261 ,37	13.999.628 ,44	16.743.086 ,56	13.201.012 ,72	13.409.342 ,07

Sumber: Badan Pusat Statistik

Fenomena itu ditunjukkan oleh tabel diatas bahwa Pendapatan Asli Daerah di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Utara mengalami Fluktuasi setiap tahunnya. Pada prinsipnya semakin besar kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, diharapkan pemerintah daerah semakin mampu membiayai keuangannya.

² Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), Hlm. 28.

Kemandirian keuangan daerah ini dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tertentu.

Sektor pendapatan daerah memegang peranan penting karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya. Secara umum, pembangunan diidentikkan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita atau populer disebut strategi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu ukuran kuantitatif untuk menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam keadaan tertentu yang dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah tujuan penting dari kebijakan ekonomi makro yang akan mampu memberikan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi ini akan menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Dalam Tabel 1.2 merupakan gambaran pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Tabel. I.2
Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah) kabupaten/Kota Di Sumatera Utara 2017-2021

N o	Kabupaten/K ota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Medan	13.973.924 ,78	14.800.714 ,48	15.678.058 ,88	15.366.983 ,83	15.768.9 37
2	Padangsidimp uan	3.830.320	4.038.930	4.261.310	4.230.410	4.346.77 0

3	Sibolga	3.224.590	3.393.910	3.570.330	3.521.720	3.595.700
4	Mandailing Natal	8.416.500	8.904.140	9.376.460	9.288.650	9.585.900
5	Asahan	23.525.345,7	24.844.068,1	26.245.240	26.299.570	27.279.590
6	Tapanuli Selatan	8.748.180	9.201.960	9.683.660	9.721.770	10.036.710

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa PDRB pada tahun 2017 ke 2021 di Kota Medan, Padangsidimpuan, Sibolga, dan Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Tapanuli Selatan mengalami peningkatan setiap tahun, tapi setiap tahun 2020 PDRB mengalami penurunan salah satu penyebab dari penurunan ini adalah pemulihan ekonomi pasca Covid-19, dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 di Kota Medan, Padangsidimpuan, Sibolga dan kabupaten mandailing Natal. Tetapi hal tersebut tidak terjadi di Kabupaten Asahan dan Tapanuli Selatan yang PDRB nya meningkat dari tahun ke tahun.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah dimana kedua variabel tersebut merupakan hubungan yang fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari PDRB. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Sehingga akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan meningkatkan produktivitasnya.³

³ Nurul Armia Gultom, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2018, (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Padangsidimpuan)," 2020, Hlm. 3.

Namun hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Triani dan Yeni Kuntari bahwa:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif karena kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam penyusunan PAD mengalami penurunan, namun PDRB selalu meningkat pada tiap tahunnya. Secara statistik jumlah penduduk berpengaruh positif, dan inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD.⁴

Selain dari Produk Domestik Regional Bruto Salah satu indikator Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Pengertian Pajak berdasarkan Pasal 1 UU KUP adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan kemakmuran rakyat.⁵ Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶ Berikut ini tabel 1.3 perkembangan pajak di Sumatera Utara di beberapa Kabupaten/Kota.

Tabel I.3
Data Pertumbuhan Pajak Daerah (Juta Rupiah) Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Medan	1.368.855,47	1.312.070,19	1.472.414,66	1.195.850,16	1.495.751,74

⁴ Triani dan Yeni Kuntari, "Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 Di Kabupaten Karanganyar (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah)," 2016, Hlm. 56.

⁵ Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, *Perpajakan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), Hlm.1.

⁶ UU No. 28/2009 tentang PDRD pasal 1.

2	Padangsidimp uan	15.653.315	18.389.004	18.577.289	16.238.177	17.346.867 ,24
3	Sibolga	9.328.680	10.394.300	11.512.430	9.712.170	11.398.530
4	Mandailing Natal	21.490.229 ,88	11.714.026 ,56	33.775.916 ,16	10.639.153 ,22	87.610.760 ,75
5	Asahan	37.930.651 ,82	42.852.881 ,29	55.100.685 ,14	59.944.433 ,84	69.628.893 ,55
6	Tapanuli Selatan	17.370.629	19.536.571	45.018.686	42.206.530	27.974.000

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dilihat dari tabel 1.3 pertumbuhan pajak daerah di kota Medan dan Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2017 mengalami kenaikan lalu tahun 2018 mengalami penurunan dan hal itu terjadi sampai tahun 2021. Sedangkan di kota Padangsidimpuan dan Sibolga terjadi penurunan dari tahun 2017 dan mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018 dan hal itu terjadi sampai tahun 2021. Berbeda dengan Kabupaten Asahan yang selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sedangkan kabupaten Tapanuli Selatan mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Realita yang terjadi di Sumatera Utara mengindikasikan bahwa ada beberapa Kabupaten/Kota menunjukkan pola hubungan berbanding terbalik antara Pajak daerah dengan Pendapatan Asli Daerah.

Pada tahun 2017-2021 terdapat beberapa daerah di Sumatera Utara khususnya Medan, Padangsidimpuan, Sibolga, Mandailing Natal, Asahan dan Tapanuli Selatan. Daerah-daerah tersebut mengalami penurunan pajak daerah namun disisi lain mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Realita tersebut secara sekilas bertentangan dengan konsep Pendapatan Asli Daerah. Menurut Mardiasmo yang dikutip dari Jurnal Puja Rizqy Ramadhan mengatakan bahwa apabila pajak

daerah dan retribusi daerah di suatu daerah mengalami peningkatan maka seharusnya PAD juga mengalami peningkatan. Sebaliknya, apabila pajak daerah dan retribusi daerah mengalami penurunan maka Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan.⁷ Dilihat dari realita tersebut, terlihat adanya indikasi permasalahan yang terjadi di Sumatera Utara dalam hal pajak daerah dengan kaitannya terhadap pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang mengisyaratkan kurang optimalnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Hal ini mengingat bahwa pajak daerah merupakan komponen penting dalam hal kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pajak Daerah yang menjadi indikator Pendapatan Asli Daerah adalah Retribusi Daerah. Berikut ini merupakan tabel data pertumbuhan Retribusi daerah.

Tabel I.4
Data Pertumbuhan Retribusi Daerah (Juta Rupiah) Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Medan	11.525.199	8.520.485	9.043.169	8.966.915	12.366.356
2	Padangsidempuan	9.044.995	9.385.099	10.226.630	8.593.294	2.258.499,98
3	Sibolga	5.006.710	5.238.860	4.841.360	4.805.170	4.246.980
4	Mandailing Natal	2.836.101	3.730.571	33.878.588	33.297.952	1.952.000
5	Asahan	5.668.242	5.859.942	7.080.357	7.845.113	6.053.178
6	Tapanuli Selatan	8.905.927	16.870.044	14.653.659	17.035.192	13.267.473

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel 1.4 diatas dapat dilihat perkembangan Retribusi daerah di Kabupaten/Kota yang ada Di Sumatera Utara seperti Medan, Padangsidempuan,

⁷ Puja Rizqy Ramadhan, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara," dalam *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, Vol.5, No.1, 2019, Hlm. 83.

sibolga, Mandailing Natal, Asahan dan Tapanuli Selatan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Menurut Warsito yang dikutip dari buku Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie yang berjudul *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, menyatakan bahwa “Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”⁸

Namun hal tersebut berbeda dengan pendapat dari Darwin dalam bukunya yang berjudul *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* yang menyatakan, “Retribusi Daerah hanya akan berpengaruh pada kesediaan menggunakan atau permintaan terhadap jasa atau pelayanan maupun produk yang dihasilkan pemerintah. Oleh karena itu, retribusi daerah tidak seperti halnya dengan pajak daerah, retribusi daerah hanya akan mengurangi konsumsi tetapi tidak mengurangi kemampuan dan kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Memang dengan retribusi itu berarti pengeluaran masyarakat akan bertambah, tetapi tidak akan signifikan sifatnya, sehingga tidak akan mempunyai dampak yang terlalu besar dalam perekonomian daerah.”⁹

Dari penelitian dan pendapat para ahli tentang Pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD menunjukkan hasil yang beragam, karena itu perlu dilakukan penelitian lebih

⁸ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH,2018), Hlm. 24.

⁹ Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), Hlm. 185.

lanjut. Maka dari itu, peneliti tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI SUMATERA UTARA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian ini adalah:

1. Terjadi fluktuasi pada Pendapatan Asli Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tahun 2017-2021.
2. Produk Domestik Regional Bruto memiliki hubungan yang fungsional terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun berpengaruh negatif terhadap PAD karena adanya indikator yang lebih berpengaruh terhadap PAD.
3. Pajak dan Retribusi Daerah merupakan indikator dari Pendapatan Asli Daerah. Meningkatnya Pajak daerah akan memengaruhi peningkatan Pendapatan Daerah, sedangkan Retribusi daerah tidak secara signifikan memengaruhi PAD.

C. Batasan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang timbul dan teridentifikasi, karena adanya keterbatasan kemampuan, waktu dan juga dana yang dimiliki peneliti. Maka peneliti melakukan pembatasan masalah untuk memfokuskan pembahasan yang akan dikaji. Berdasarkan identifikasi yang ada, peneliti lebih memfokuskan pada variabel bebas dan variabel terikat. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini

yaitu Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah, sedangkan variabel terikatnya yaitu Pendapatan Asli Daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara?
2. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara?
3. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara?
4. Apakah Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara?

E. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variable yaitu penjelasan yang mampu mengemukakan indikator-indikator dari setiap variabel yang diteliti. Indikator dari variabel inilah yang harus dijelaskan dalam bagian kerangka teori.

Tabel 1.5 Defenisi Operasioanl Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
PDRB (X_1)	Total nilai barang dan jasa yang di produksi di wilayah atau regional tertentu dan dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun.	1. Penanaman Modal asing 2. Dana Alokasi Umum 3. Inflasi	Rasio

Pajak Daerah (X ₂)	Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Parkir	Rasio
Retribusi Daerah (X ₃)	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Usaha 3. Retribusi Perizinan Tertentu	Rasio
PAD (Y)	Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.	1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah	Rasio

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka perlu di ketahui tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara.

G. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini maka hasilnya di harapkan dapat mengambil manfaat sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi kontribusi atau masukan terhadap Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Sumatera Utara serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perkembangan perekonomian di Sumatera Utara.

2. Penulis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan dan menjadi dasar kajian pengambil kebijakan pendapatan asli daerah di Sumatera Utara.

3. Pengembangan keilmuan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi pihak universitas khususnya UIN Syekh Ali Hasan Ahmad

Addary padang sidimpuan sekaligus sebagai koleksi pembendarahaan refrensi dan tambahan wacana pengetahuan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada maka penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan masing-masing bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan meliputi latar belakang masalah dimana dalam hal ini dijelaskan tentang alasan peneliti terkait judul, identifikasi masalah yang didalamnya dicantumkan beberapa masalah yang terdapat dalam penelitian, dan batasan masalah yang berisikan tentang pembatasan pembahasan dalam penelitian ini, serta rumusan masalah, defenisi operasional variabel, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II, landasan teori yang terdiri dari kerangka teori yang berisikan teori tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian terdahulu yang menggambarkan penelitian terkait judul, kerangka pikir dan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab III, metode penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian dalam hal ini merupakan penelitian kuantitatif, teknik pengambilan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data dalam hal ini dijelaskan bagaimana teknik yang digunakan dalam mengolah data penelitian.

Bab IV, membahas tentang gambaran dan sejarah dari objek (wilayah) yang diteliti. Mendeskripsikan data yang tertuang dalam penelitian serta mendeskripsikan hasil analisis penelitian dengan menggunakan teknik analisis data yang sudah ditetapkan dalam metode penelitian. Serta memuat tentang keterbatasan penelitian

Bab V, berupa penutup yang mana di dalamnya memuat tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Pada umumnya dalam sub pembahasan ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian dengan membuat kesimpulan dari peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

a. Defenisi Produk Domestik Regional Bruto

Seperti yang telah diuraikan bahwa angka pendapatan regional untuk beberapa tahun menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat pendapatan masyarakat daerah tersebut, kenaikan maupun penurunan dapat dibedakan menjadi dua faktor, yakni:

- 1) Kenaikan ataupun penurunan riil, yaitu kenaikan atau penurunan tingkat pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan riil pendapatan penduduk berarti daya beli penduduk pada daerah tersebut meningkat, misalnya mampu membeli barang yang sama kualitasnya dalam jumlah yang lebih banyak.
- 2) Kenaikan ataupun penurunan pendapatan yang disebabkan adanya faktor perubahan harga. Harga konstan artinya harga produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu, tahun yang dijadikan patokan harga disebut tahun dasar penentuan harga konstan, jadi kenaikan pendapatannya hanya disebabkan oleh

meningkatnya jumlah fisik produksi, karena dianggap konstan (tetap).¹⁰

PDRB merupakan total nilai barang dan jasa yang di produksi di wilayah atau regional tertentu dan dalam kurun waktu tertentu biasanya satu tahun. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDRB menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik adalah sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu.¹¹

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan hasil dari nilai bersih suatu barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas ekonomi di suatu daerah dalam periode (setahun) dimana semakin tinggi Produk Domestik

¹⁰Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), Hlm.20-21.

¹¹ Himawan Yudistira Dama, Dkk., "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado", dalam *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume16, Nomor 03, 2016, Hlm.553.

Regional Bruto (PDRB) di suatu daerah maka semakin tinggi pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Perhitungan PDRB berdasarkan Harga Konstan merupakan gambaran untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah.¹² Dalam hal lain yang menentukan taraf kemakmuran suatu negara maupun wilayah dapat dilihat dari pendapatan perkapita masyarakat tersebut, yang mampu mendorong peningkatan di bidang pertumbuhan ekonomi suatu negara.¹³ Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu Negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah dan lainnya.¹⁴

Pertumbuhan ekonomi selama tiga dasawarsa yang lalu adalah kemampuan suatu Negara untuk meningkatkan atau mempertahankan suatu Produk Domestik Bruto antara 5% sampai 7%. Namun seiring dengan berkembangnya jaman, pengertian pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan karena ketika pertumbuhan ekonomi

¹²Annisa Permatasari, *Analisis Peranan Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Di Kabupaten Grobogan*, (Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), Hlm. 13-14.

¹³ Sadono sukirno, *Makroekonomi: teori pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 424.

¹⁴ Darwis Harahap, Dkk., Analisis Kausalitas Antara Investasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara, dalam *Jurnal Profjes*, Vol. 1, No. 1, Juni 2022, Hlm. 205.

berorientasikan hanya pada PDB, ternyata tidak mampu memecahkan masalah pembangunan secara menyeluruh.¹⁵

Faktor-faktor yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto yaitu:

a) Penanaman Modal Asing

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa penerimaan modal asing adalah penanaman modal yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing yang sepenuhnya asing ataupun bekerja sama dengan penanaman modal dalam negeri.¹⁶

b) Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah transfer dana dalam bentuk “*Block Grant*” yang artinya dibiayai pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, dan mereka bebas menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan prioritas dan kebutuhan mereka seperti meningkatkan pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah.¹⁷

¹⁵ Abdul Halim, Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, Dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 2020, Hlm. 160.

¹⁶ Nurlaila Tito Wardani dan Muchtolifah, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Jawa Timur” dalam *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, Hlm. 98.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm.16.

c) Inflasi

Inflasi adalah kejadian apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik, seperti beras, bahan bakar mobil, tingkat upah, harga tanah, sewa barang modal juga naik. Selain itu inflasi juga merupakan gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus.¹⁸

b. Produk Domestik Regional Bruto Dalam Islam

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan suatu indikator yang disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam perspektif ekonomi islam mengenai batasan tentang persoalan ekonomi, perspektif islam tidaklah sama dengan yang dianut sistem ekonomi kapitalis, yang dimaksud dengan persoalan ekonomi adalah permasalahan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Dalam islam pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai *A Sustained growth of a right kind of output which on contribute to human welfare*. (Sebuah pertumbuhan atau hasil yang terus menerus dengan cara yang benar yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia).¹⁹ Pertumbuhan ekonomi dalam islam telah digambarkan dalam Qs. Nuh ayat 10-12 yaitu:

¹⁸*Ibid.*, Hlm. 4.

¹⁹ Delima Sari, Dkk., Pengaruh Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pengentasan Kemiskinan Sebagai Variabel Moderating Di Provinsi Sumatera Utara, dalam *Jurnal Profjes*, Vol. 1, No. 1, Juni 2022, Hlm. 6.

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠١﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
مِدْرَارًا ﴿١٠٢﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلَ لَكُمْ
أَنْهَارًا ﴿١٠٣﴾

Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, Dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.'²⁰

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT. menjanjikan rizki yang berlimpah kepada satu kaum jika kaum tersebut mau untuk bebas dari kemaksiatan. Ekonomi islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang terus menerus dari faktor-faktor produksi secara benar akan mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan. Dalam islam, kesejahteraan tersebut dapat dilakukan jika sumber daya ekonomi dapat dialokasikan dengan benar.²¹

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2017), Hlm. 446.

²¹ Elis Susanti, *Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2015 Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, Hlm.126.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Teori *development from below* berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka. Berdasarkan pendapat tersebut terlihat pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah. Selain itu, manfaat dari pajak daerah dapat secara langsung dilihat oleh masyarakat di daerah.

Bahl dan Smoke (2003), berpendapat bahwa:

“local government taxes must be politically acceptable. One rule of thumb is that less visible taxes tend to be more acceptable,”

Pajak pemerintah daerah harus secara politik dapat diterima. Dimana pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tarif, siapa yang harus membayar, sanksi terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislatif sebagai representasi masyarakat.²²

b. Macam-Macam Pajak Daerah

- 1) Pajak Hotel, dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, sedangkan tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah setempat paling tinggi

²² Damas Dwi Anggoro, “Pajak Daerah Dan Retribusi daerah,” (Malang: UB Press, 2017), Hlm. 45.

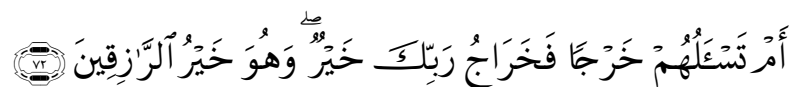
sebesar 10%. Besarnya pajak hotel terutang dapat dihitung dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan.

- 2) Pajak Restoran, yang menjadi dasar pengenaan dari pajak ini adalah jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh restoran, sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah setempat paling tinggi 10%. Besarnya pajak terutang diperoleh dengan mengalikan dasar pengenaan dengan tariff.
- 3) Pajak Hiburan, dasar pengenaan dari pajak ini adalah jumlah uang yang diterima oleh penyelenggara hiburan, dengan tarif yang ditetapkan oleh peraturan daerah paling tinggi sebesar 35%. Khusus untuk hiburan berupa permainan ketangkasan, diskotik, klab malam, karaoke, pagelaran busana, kontes kecantikan, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling besar 75%.
- 4) Pajak Reklame, dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak reklame adalah dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan.
- 5) Pajak Penerangan Jalan (PPJ), yang menjadi dasar pengenaan dari pajak ini adalah nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan dan tarif pengenaannya adalah 10% paling tinggi.

- 6) Pajak Parkir, dasar pengenaan pajak ini adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Besarnya tarif pajak parkir ditetapkan dengan peraturan daerah paling tinggi sebesar 30%. Besarnya pajak terutang adalah mengalikan tariff dengan dasar pengenaan pajak.²³

c. Pajak Dalam Islam

Pada zaman Rasulullah konsep pajak sudah diterapkan, orang arab biasa menyebutnya dengan *jizyah*, selain itu rasulullah juga menerapkan sistem *kharaj* yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim. Dalam terminologi keuangan islam, *kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah. Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Mu'minin ayat 72 yaitu:



“Atau kamu meminta upah kepada mereka?”, Maka upah dari Tuhanm adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezki yang paling baik”.²⁴

Ada perbedaan antara *al-kharaju* dengan *al-kharaj*. *Al-kharaju* (upah) diterapkan kepada orang, sedangkan *al-kharaj* (pajak) diterapkan pada tanah. *Kharaj* adalah hak yang diberikan Allah SWT. kepada kaum muslim

²³ Edward M. Hutagalung, “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Andalan Pendapatan Asli Daerah,” (Bandung: ALQAPRINT JATINANGOR, 2020), Hlm. 19-26.

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2017), Hlm. 277.

dari orang-orang yang musyrik yang tergolong dalam kelompok pendapatan Negara.²⁵

3. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Tarif *atau user charges* atau retribusi merupakan suatu sistem pembayaran atau sistem tagihan biaya dimana seseorang mengkonsumsi suatu barang atau jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Selain itu ada pula yang mendefinisikan *user charges* sebagai *beneficiary charges*, dimana didefinisikan suatu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dalam suatu proses pertukaran tidak langsung dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah.

Sedangkan menurut UU 28 Tahun 2009, retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²⁶

b. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Tidak semua jenis retribusi yang diberikan pemerintah daerah dapat dipungut, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu dikelompokkan ke dalam tiga golongan yaitu sebagai berikut:

²⁵ Dinda Rachmah, Dkk., Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Malang 2017-2019, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol.5, No.2, November 2020, Hlm. 151.

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 14.

- a. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah seperti retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/kebersihan, pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, pelayanan pemakaman, pelayanan parkir di tepi jalan umum dan pelayanan pasar.
- b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi keluarga dan olahraga, dan lainnya.
- c. Retribusi Jasa Perizinan Tertentu, fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi, namun untuk melaksanakan fungsi tersebut pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah,

sehingga terhadap perizinan tertentu masih perlu dipungut retribusi. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin usaha perikanan dan lainnya.²⁷

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah merupakan sejumlah uang yang diterima oleh daerah, baik atas hasil usahanya sendiri maupun atas bantuan dari pemerintah pusat atau dari sumber lainnya yang sah. Struktur pendapatan asli daerah adalah dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Selain itu pendapatan asli daerah yang sah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1,2,dan 3 (pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pinjaman daerah), yaitu berupa dana hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan dana otsus serta bantuan dari daerah yang lebih atas (provinsi) atau daerah lain.²⁸

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 16.

²⁸ Rini Hayati Lubis, Fitriani, Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Prpvinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016, dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2018, Hlm. 120.

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁹

Potensi pendapatan asli daerah pada umumnya belum tergali secara maksimal. Hal ini disebabkan kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerahnya, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relative rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalanka programnya, ketidaktimisan akan hasil yang mungkin dicapai. Di sisi lain, seringkali pengeluaran biaya yang digunakan untuk menjalankan program dinaikkan (*mark up*) sejak awal pada setiap anggarannya. Padahal jika sejak awal penganggaran biaya program diefektifkan sehemat mungkin, maka sisa yang ada dapat digunakan untuk menjalankan program lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.³⁰

b. Instrument pendapatan asli daerah

1) Pajak

Pajak daerah merupakan sumber PAD yang sangat potensial dalam menyumbang sisi penerimaan daerah. Defenisi pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 9.

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 2 .

kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur.³¹

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, maka ditegaskan bahwa penempatan beban rakyat seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa dan diatur dengan undang-undang. Pajak daerah secara umum adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Lapangan pajak daerah hanya terbatas pada lapangan pajak yang belum dipungut oleh Negara (pusat), misalnya pajak atas penghasilan tidak boleh dipungut oleh daerah karena telah dipungut oleh pemerintah pusat. Sebaliknya Negara juga tidak diperkenankan untuk memungut pajak

³¹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 52..

dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sebelum berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 1997 (UU PDRD) pajak-pajak yang dapat dipungut oleh daerah tingkat I antara lain meliputi:

- a) Pajak atas izin menangkap ikan di perairan umum dalam wilayah tersebut.
- b) Pajak sekolah yang semata-mata diperuntukkan membiayai pembangunan rumah sekolah, yang menjadi beban pemerintah daerah.
- c) Opsen atas pokok pajak kekayaan (Ordonasi Pajak Kekayaan 1932).
- d) Opsen atas pajak penjualan bensin (Pasal 13 UU No. 1/1957).³²

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah perusahaan daerah. Pemerintah daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang disebut perusahaan daerah. Salah satu maksud yang didirikan perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun bukan berarti bahwa perusahaan tidak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Perusahaan

³²*Ibid.*, Edward M. Hutagalung, Hlm. 16.

daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dan pihak lain. Hal ini sesuai sejalan dengan fungsi koperasi yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial serta memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

Dapat disebutkan bahwa retribusi diperuntukkan pada pelaku ekonomi yang memperoleh pendapatan melalui bidang pemberian jasa atau perizinan dalam suatu usaha, sehingga dapat menambah sumber pendapatan asli daerah. Misalnya surat keterangan mendirikan bangunan milik pribadi atau suatu badan tertentu.³³

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat

³³ Ikhwanuddin Harahap, Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara, dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2018, Hlm. 55.

dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997. Ciri-ciri retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah,
- b) Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis,
- c) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, dan
- d) Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disediakan Negara.³⁴

c. Pendapatan Asli Daerah Dalam Islam

Pendapatan suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain pemerintah (pengatur kebijakan), pelaku ekonomi (pengusaha yang menyerap tenaga kerja), dan masyarakat (baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen). Ketiga elemen diatas mempunyai peran penting yang sama-sama dapat menunjang pendapatan daerah menjadi lebih baik. Dalam sudut pandang islam, pendapatan merupakan suatu upaya pemerintah dalam menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil karena pada dasarnya hakikat permasalahan ekonomi berasal

³⁴ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm. 29.

dari bagaimana distribusi harta ditengah-tengah masyarakat terjadi.³⁵

Dalam firman Allah SWT. telah dijelaskan mengenai Pendapatan Asli Daerah dalam Qs. Al-an'am ayat 165 yaitu sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”³⁶

Pada kalimat *“penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat”* ditujukan kepada para penguasa/pemerintah dalam suatu Negara atau daerah atas amanah yang mereka emban untuk kepentingan rakyat. Ayat diatas menjelaskan tentang kemandirian keuangan (baik penerimaan maupun pengeluaran) suatu daerah dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan kemampuan para pengelolanya (penguasa suatu negeri/daerah).

³⁵ Aliman Syahuri Zein, Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2018, Hlm. 4.

³⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Toha Karya Toha Putra Semarang, 2017), Hlm. 199.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu sebelum penelitian ini. Hasil penelitian tersebut dijadikan referensi dalam penelitian ini, baik variabel-variabel terkait dan asumsi-asumsi yang relevan dari hasil penelitian tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Monalisah Harahap (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020)	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018	Berdasarkan hasil uji secara parsial (t) variabel penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di sumatera utara 2015-2018. Sedangkan variabel retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di sumatera utara tahun 2015-2018.
2	Rukmi Juwita dan Annisa Widia (Jurnal Akuntansi Keuangan Politeknik Pos Indonesia, 2022)	Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	Hasil pengelolaan menggunakan uji t yang menunjukkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($-1,530 > -2,042$) yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara Produk Domestik Regional Bruto terhadap

			Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Barat.
3	I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta (Jurnal FEB Universitas Udayana, 2020)	Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah	Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) dengan menggunakan uji F diperoleh nilai F hitung $44,825 > F$ tabel 3,98 dengan nilai signifikansi P value $0,000 < 0,05$. Hasil ini menerangkan bahwa retribusi daerah dan pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Monalisah Harahap

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan Pajak daerah dan Retribusi daerah sebagai variabel X, dan menggunakan Variabel Y yang sama yaitu PAD.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menambahkan PDRB sebagai variabel X, perbedaan lainnya adalah tahun penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

2. Rukmi Juwita dan Annisa Widia

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan PDRB sebagai variabel X dan PAD sebagai variabel Y. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu meneliti di lokasi Kabupaten/Kota di

Provinsi Sumatera Barat dan penelitian ini berlokasi di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.

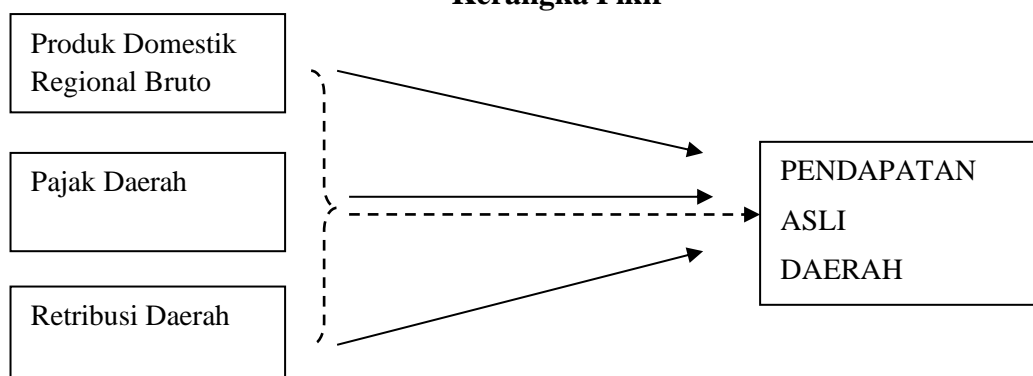
3. I Putu Agus Sudarmana dan Gede Mertha Sudiarta

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini sama- sama membahas Pajak daerah dan Retribusi daerah sebagai variabel X dan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Y, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menggunakan perangkat pengolahan data *Eviews 9*, sedangkan penelitian terdahulu menggunakan *SPSS* sebagai perangkat pengolahan datanya.

C. Kerangka berpikir

Kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan.³⁷ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mengetahui pengaruh PDRB, pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Sumatera Utara. Secara matematis kerangka pemikiran ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Gambar II.1
Kerangka Pikir



³⁷Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 89.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

a. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada wilayah Sumatera Utara dengan perolehan data yang di publikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara melalui laman websitenya di www.bps.go.id. mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Dan waktu penelitian akan dilaksanakan dari bulan Oktober 2022 sampai Juli 2023.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di laksanakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan atau pengaruh yang terukur, meramalakan dan mengontrol. Data kuantitatif adalah data statistik yang berbentuk angka-angka sebagai hasil dari analisis data yang diolah dan berbentuk perhitungan angka-angka. Penelitian kuantitatif dimulai dengan kegiatan menjajahi permasalahan yang akan menjadi pusat perhatian peneliti. Kemudian peneliti mendefenisikan serta memformulasikan masalah peneliti dengan jelas sehingga mudah dimengerti.³⁹ Menurut waktu pengumpulannya penelitian ini menggunakan data panel. Data panel merupakan gabungan antara data silang (*cross section*) dan data runtut waktu (*time series*).

³⁹ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2005), Hlm. 118.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang dapat berisi informasi yang bersifat umum ataupun informasi yang spesifik.⁴⁰ Data yang diperoleh berupa data tahunan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2021.

d. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari pengertian itu, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang di pelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut.⁴¹ Populasi dalam penelitian ini adalah wilayah Sumatera Utara.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Sugiono pada dasarnya ukuran sampel merupakan langkah untuk menentukan besarnya sampel tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan cara statistik ataupun besarnya

⁴⁰Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga,2009), Hlm. 153..

⁴¹Sugiono,*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D* (Bandung : Penerbit Alfabert,2010), Hlm. 80.

estimasi penelitian. Selain itu perlu diperhatikan juga bahwa sampel yang dipilih harus representatif (mewakili) artinya segala karakteristik populasi hendaknya tercermin dalam sampel yang di pilih. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 sampel yang terdiri dari 3 Kabupaten dan 3 Kota dari tahun 2017-2021. Adapun Kabupaten/Kota yang menjadi tempat penelitian ini adalah Medan, Padangsidempuan, Sibolga, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan dan Asahan.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dari hasil pengolahan pihak kedua, dengan cara perolehan datanya terdiri dari berbagai sumber seperti dari sumber perusahaan, lembaga pemerintah maupun swasta baik melalui laporan-laporan, publikasi atau dokumen.⁴² Data yang digunakan peneliti adalah data panel, karena data penelitian yang diperoleh merupakan kombinasi antara data *Cross Section* atau data di satu waktu tertentu yang disandingkan dengan data *time series* atau data runtut waktu. Data dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi BPS atau Badan Pusat Statistik Sumatera Utara di laman websidenya www.bps.go.id mulai tahun 2017 sampai 2021. Dimana data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data PDRB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PAD Sumatera Utara.

⁴²Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), Hlm. 121.

f. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini data akan dianalisis menggunakan bantuan program komputer yaitu *EVIIEWS 9*. Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 5% atau 0,05 karena pada umumnya suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan sebesar 5% dan taraf kepercayaannya sebesar 95 persen. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Model Estimasi Regresi Data Panel

a. Common Effect Model

Model seperti ini dikatakan sebagai model paling sederhana dimana pendekatannya mengabaikan dimensi waktu dan ruang yang dimiliki oleh data panel yang hanya mengkombinasikan data time series dan data cross section. Akan tetapi menggabungkan data tersebut, maka tidak dapat dilihat perbedaannya baik antar individu maupun antar waktu.

b. Fixed effect model

Pendekatan dengan metode kuadrat terkecil biasa adalah pendekatan yang mengasumsikan *intersep* dan koefisien regressor dianggap konstan untuk seluruh unit wilayah maupun unit waktu.

c. *Random effect model*

Pendekatan *random effect* memperbaiki efisiensi proses *least square* dengan memperhitungkan eror dari *cross section* dan *time series*.

2. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Ada tiga uji yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel, yaitu *common effect*, *fixed effect* dan *random effect* dengan melakukan pengujian yaitu:

a. Uji *Chow*

Uji Chow dilakukan untuk mengetahui model yang lebih baik antara *common effect* dan *fixed Effect*. Hipotesis pada uji *chow* adalah sebagai berikut:

Ho : *Common Effect*

Ha : *Fixed Effect*

Kriteria :

Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ maka Ho diterima

Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ maka Ha diterima⁴³

b. Uji *Hauseman*

⁴³ Shochrul R. Ajijah, *et. Al. Cara Cerdas Menguasai Eviews (Jakarta : Salemba Empat, 2011), Hlm. 51-52.*

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui model mana yang lebih baik antara *random effect* dan *fixed effect*. Hipotesis pada uji Husman adalah sebagai berikut:

Ho: *Random Effect*

Ha: *Fixed effect*

Kriteria:

Jika nilai $\text{sig} > \alpha$ maka Ho diterima

Jika nilai $\text{sig} < \alpha$ maka Ha diterima

c. Uji *Lagrange Multiplier* (Uji LM)

Uji *lagrange multiplier* adalah uji untuk menentukan model regresi yang lebih tepat antara model *Random Effect* dan *Common Effect*. Hipotesis dalam uji *lagrange multiplier* adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect* sebagai model terpilih (*Both Breusch-Pagan* $> 0,05$)

H_a : *Random Effect* sebagai model terpilih (*Both Breusch-Pagan* < 0.05)

Dasar penolakan hipotesis uji *Lagrange Multiplier* H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya model yang digunakan adalah *Random Effect Model*. Sedangkan H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya model yang digunakan adalah *Common Effect Model*.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas yang sering digunakan adalah uji *Jarque-Bera* (JB).

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji T)

Analisis statistik secara parsial digunakan untuk melihat signifikansi dari masing-masing variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat pada model dengan menggunakan uji t, dimana hipotesis nol ($H_0: \beta = 0$) artinya nilai koefisien sama dengan nol, sedangkan hipotesis alternatif ($H_1: \beta \neq 0$) artinya nilai koefisien berbeda dengan nol..

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F atau uji model secara keseluruhan dilakukan untuk melihat apakah semua koefisien regresi berbeda dengan nol atau model yang diterima. Uji F dapat dilakukan dengan cara yang sama dengan uji t yaitu membandingkan t-statistik dan t-tabel. Selain dengan cara tersebut dapat juga dilakukan dengan konsep p-value.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi. Koefisien determinasi menggambarkan bagian dari varians total yang dapat diterangkan oleh

model. Semakin besar nilai R^2 atau mendekati 1, maka ketepatannya dikatakan semakin baik.

5. Analisis Regresi Berganda

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan formula sebagai berikut:

$$PAD = a + b_1 PDRB + b_2 PD + b_3 RD + e$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta

b_1 = Koefisien untuk variabel PDRB

b_2 = Koefisien untuk variabel Pajak Daerah

b_3 = Koefisien untuk variabel Retribusi Daerah

e = Tingkat kesalahan

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

PD = Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya adalah Medan. Provinsi ini terletak di bagian utara yang diapit oleh tiga provinsi yaitu Aceh di bagian utara, Riau dan Sumatera Barat di bagian selatan. Secara geografis Provinsi Sumatera Utara terletak diantara koordinat $97^{\circ}00'$ BT - $100^{\circ}28'$ BT dan $4^{\circ}18'$ LU – $0^{\circ}38'$ LS.⁴⁴ Sumatera Utara yang sekarang kita kenal adalah daerah yang memiliki sejarah panjang. Wilayah Sumatera Utara telah dihuni oleh manusia sejak ribuan tahun sebelum masehi. Pada saat itu penghuni Sumatera Utara disebut orang Austro Melanesoid yang banyak mendiami daerah muara-muara sungai.

Pada abad ke-16 di wilayah Sumatera Utara terdapat tiga kerajaan yang cukup besar yaitu Nagur, Batak dan Aru. Kerajaan Nagur menguasai wilayah Simalungun. Kerajaan Batak menguasai wilayah Tapanuli, Mandailing dan Dairi. Kerajaan Aru menguasai wilayah yang sangat luas di pesisir timur Sumatera Utara mulai dari Langkat sampai Labuhanbatu.⁴⁵ Sumatera Utara dibagi menjadi tiga kelompok wilayah yang dilihat dari kondisi letak serta kondisi alamnya yaitu:

1. Kawasan Pantai Barat yang meliputi Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli

⁴⁴ Moh. Farukhi, *Mengenal 34 Provinsi Indonesia: Sumatera Utara*, (Surakarta: Sinergi Prima Magna, 2018), Hlm.14.

⁴⁵ *Ibid.*, *Mengenal 34 Provinsi Indonesia: Sumatera Utara*, Hlm. 30.

Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga, dan kota Gunung Sitoli.

2. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten samosir dan Pematangsiantar.
3. Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan dan Kota Binjai.⁴⁶

B. Gambaran Umum Variabel Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah

Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus berupaya mengembangkan potensi-potensi daerah salah satunya melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor Pendapatan Asli Daerah memegang peranan penting karena melalui sektor inilah pemerintah dapat melihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

⁴⁶ Badan Pusat Statistik, “*Sumatera Utara Dalam Angka 2017*”, (<http://sumut.bps.go.id>, diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 20.18 WIB)..

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp 13,52 triliun, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 5,99 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 7,43 triliun, dan sisanya dari lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2021 sebesar Rp 858,87 triliun. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kontributor utama dengan peranan mencapai 22,04 persen. Selanjutnya diikuti oleh Kategori Industri Pengolahan sebesar 19,52 persen dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,91 persen. Sementara itu, kategori-kategori lainnya memberikan total kontribusi sebesar 39,53 persen terhadap perekonomian di Sumatera Utara.

Untuk melihat produktivitas ekonomi (dengan mengabaikan inflasi), maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Berdasarkan harga konstan tahun 2010, PDRB Sumatera Utara pada tahun 2021 sebesar Rp 547,65 triliun. Kategori Pertanian Kehutanan dan Perikanan mengalami

kontribusi tertinggi yaitu sebesar 25,85 persen, diikuti oleh Kategori Industri Pengolahan sebesar 17,88 persen dan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,00 persen. Secara keseluruhan perekonomian Sumatera Utara tahun 2021 tumbuh sebesar 2,61 persen, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar -1,07 persen. PDRB perkapita Sumatera Utara tahun 2021 sebesar Rp 57,57 juta. Sementara itu, berdasarkan harga Konstan 2010, PDRB perkapita tahun 2021 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar Rp 36,18 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 36,67 juta pada tahun 2021.

3. Pajak Daerah

Sesuai ketentuan umum perpajakan Tahun 2009 pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib pajak dan membayarnya dengan tidak mendapat prestasi/balas jasa secara langsung. Hasil dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Terdapat dua pendekatan dalam pemungutan pajak yaitu *benefit approach* dan *ability to pay approach*. *Benefit approach* adalah prinsip pengenaan pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh seorang wajib pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah. *Ability to pay approach* merupakan prinsip kemampuan untuk membayar atau berdasarkan daya pikul seorang wajib pajak.

4. Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga menjadi komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan atas pembayaran jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa maupun perizinan tertentu yang khusus atau diberikan pemerintah daerah. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Jenis-jenis retribusi sebagaimana telah dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 28, Tahun 2009 Pasal 1 diuraikan bahwa retribusi jasa umum terdiri atas 14 jenis retribusi, retribusi jasa khusus terdiri dari 11 retribusi dan retribusi perizinan tertentu terdiri dari 5 jenis retribusi.

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang memiliki beragam kawasan wisata serta budaya yang unik. Hal ini dapat berpotensi menghasilkan retribusi daerah yang cukup besar dari berbagai sumber, seperti berasal dari sektor pariwisata, perdagangan, hotel, dan penerimaan lainnya.

C. Hasil Analisis Data

1. Model Estimasi Data Panel dan Uji Pemilihan Model Estimasi Data Panel

a. *Common Effect Model*

Teknik paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Model ini dikenal dengan estimasi *common effect*, dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi waktu maupun individu.

Tabel IV.1
Common Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/09/23 Time: 05:00
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	50709045	12678238	3.999692	0.0005
X1	-2.150448	0.821409	-2.617999	0.0146
X2	-0.012177	0.288687	-0.042179	0.9667
X3	1.251491	0.674749	1.854750	0.0750
R-squared	0.339752	Mean dependent var		39705197
Adjusted R-squared	0.263569	S.D. dependent var		34567467
S.E. of regression	29664260	Akaike info criterion		37.37235
Sum squared resid	2.29E+16	Schwarz criterion		37.55918
Log likelihood	-556.5852	Hannan-Quinn criter.		37.43212
F-statistic	4.459709	Durbin-Watson stat		0.840150
Prob(F-statistic)	0.011776			

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Setelah melakukan estimasi tabel IV.1 di atas, selanjutnya dipilih model estimasi yaitu *Fixed Effect Model*.

b. *Fixed Effect Model*

Model ini mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersip, dan model ini seringkali disebut dengan teknik *least squares dummy variables*.

Tabel IV.2
Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 06/09/23 Time: 05:00				
Sample: 2017 2021				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 6				
Total panel (balanced) observations: 30				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12495997	76407237	-0.163545	0.8717
X1	5.239959	7.311908	0.716634	0.4815
X2	-0.656083	0.386090	-1.699302	0.1040
X3	0.909361	0.740838	1.227476	0.2332
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.689741	Mean dependent var	39705197	
Adjusted R-squared	0.571547	S.D. dependent var	34567467	
S.E. of regression	22626580	Akaike info criterion	36.95047	
Sum squared resid	1.08E+16	Schwarz criterion	37.37083	
Log likelihood	-545.2571	Hannan-Quinn criter.	37.08495	
F-statistic	5.835680	Durbin-Watson stat	1.553046	
Prob(F-statistic)	0.000550			

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Setelah hasil *common effect* dan *fixed effect* diperoleh maka selanjutnya dilakukan uji *chow*. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui model yang paling tepat diantara model *common effect* dan *fixed effect*. Uji ini dilakukan untuk mengetahui model yang lebih baik antara *Common Effect* dan *Fixed Efeect*. Hipotesis pada uji *Chow* adalah:

Ho : *Common Effect* yang paling sesuai

Ha: *Fixed Effect* yang paling sesuai

Dengan kriteria:

Jika nilai Sig > α , maka Ho diterima

Jika nilai Sig < α , maka Ha diterima. Hasil uji *chow* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.3
Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.737839	(5,21)	0.0047
Cross-section Chi-square	22.656280	5	0.0004

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai prob. *Cross-section F* sebesar 0,00 yang nilainya < 0,05 dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih tepat dibandingkan model *common effect*. Selanjutnya model *fixed effect* akan diuji dengan model *random effect* untuk memilih model terbaik.

c. *Random Effect Model*

Dalam model ini dapat mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu atau antar individu (*time series* dan *cross section*). Pada model *random effect* perbedaan antar individu dan waktu dicerminkan lewat *error*.

Tabel IV.4
Random Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 06/09/23 Time: 05:01
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 30
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	52466505	23388090	2.243300	0.0336
X1	-1.385884	1.712809	-0.809129	0.4258
X2	-0.386874	0.318795	-1.213553	0.2358
X3	1.139041	0.684176	1.664836	0.1080

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		29022598	0.6220
Idiosyncratic random		22626580	0.3780

Weighted Statistics			
R-squared	0.245190	Mean dependent var	13071743
Adjusted R-squared	0.158097	S.D. dependent var	24037708
S.E. of regression	22055863	Sum squared resid	1.26E+16
F-statistic	2.815259	Durbin-Watson stat	1.380832
Prob(F-statistic)	0.058892		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.293661	Mean dependent var	39705197
Sum squared resid	2.45E+16	Durbin-Watson stat	0.713536

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Setelah hasil dari *fixed effect* dan *random effect* diketahui maka akan dilakukan uji *hausman*. Uji ini dilakukan untuk mengetahui model yang lebih baik antara *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model*.

Hipotesis pada uji *Hausman* adalah:

Ho : *Random Effect* yang paling sesuai

Ha: *Fixed Effect* yang paling sesuai

Dengan kriteria:

Jika nilai $\text{Sig} > \alpha$, maka H_0 diterima

Jika nilai $\text{Sig} < \alpha$, maka H_a diterima. Hasil uji *hausman* dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel IV.5
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.704930	3	0.6358

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Dari uji Hausman di atas, dapat dilihat bahwa nilai Prob Cross-Section Random sebesar $0,63 > 0,05$, yang artinya H_0 di terima dan H_a di tolak. Maka model yang terpilih adalah *Random Effect Model*. Dan akan dilakukan uji *Lagrange Multiplier*. Jika yang terpilih adalah *fixed effect model*, maka pengujian selesai. Jika *random effect model* yang terpilih maka akan dilanjutkan dengan melakukan uji *Lagrange Multiplier*.

Tabel IV.6
Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	6.612137 (0.0101)	2.078296 (0.1494)	8.690433 (0.0032)
Honda	2.571408 (0.0051)	-1.441630 --	0.798874 (0.2122)
King-Wu	2.571408 (0.0051)	-1.441630 --	0.639744 (0.2612)
Standardized Honda	4.429866 (0.0000)	-1.284910 --	-1.333127 --
Standardized King-Wu	4.429866 (0.0000)	-1.284910 --	-1.524642 --
Gourieriou, et al.*	--	--	6.612137 (< 0.05)

*Mixed chi-square asymptotic critical values:

1%	7.289
5%	4.321
10%	2.952

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Kriteria uji *lagrange multiplier*:

H_0 : *Common Effect* sebagai model terpilih (*Both Breusch-Pagan* $> 0,05$)

H_a : *Random Effect* sebagai model terpilih (*Both Breusch-Pagan* $< 0,05$)

Berdasarkan uji di atas dapat dilihat bahwa nilai *Both Breusch-Pagan* sebesar $0,00 < 0,05$ maka H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih adalah *Random Effect Model*. Untuk model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *random effect model*.

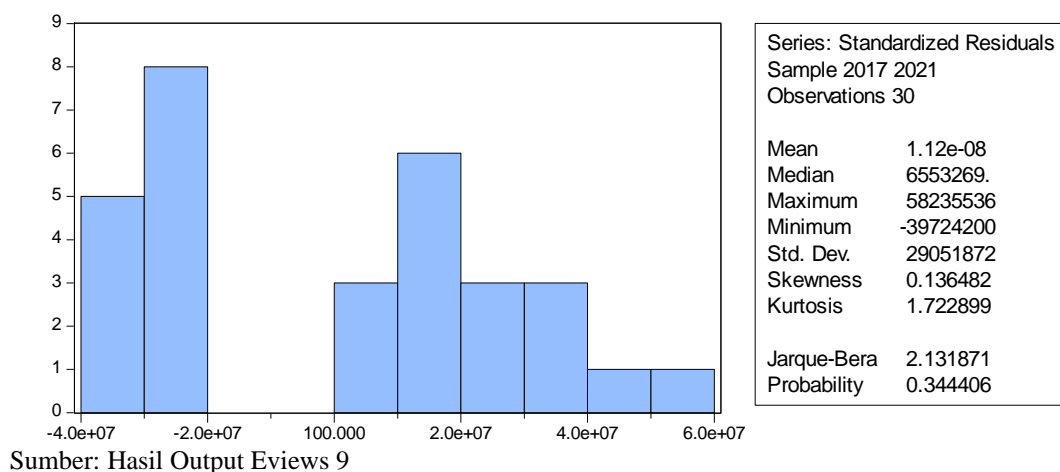
2. Uji Normalitas

Penggunaan uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang di ambil berdasarkan dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan Eviews 9 dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Dengan kriteria sebagai berikut:

Jika nilai Prob $>$ α maka data berdistribusi normal

Jika nilai Prob $<$ α maka data tidak berdistribusi normal

Tabel IV.7
Uji Normalitas



Dari gambar di atas dapat dilihat hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Probability sebesar $0,34 > 0,05$, maka data berdistribusi normal.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial

Untuk melihat ada tidaknya pengaruh variabel independent secara parsial terhadap variabel dependen, penelitian ini menggunakan nilai probabilitas yang akan di bandingkan dengan taraf signifikan 0,05. Dengan

ketentuan jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka H_0 di tolak. Hasil uji T dalam penelitian ini adalah:

Tabel IV.8
Uji Parsial (t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22.66760	4.714397	4.808165	0.0001
LOG(X1)	-0.663219	0.206543	-3.211049	0.0035
LOG(X2)	0.030891	0.116682	0.264744	0.7933
LOG(X3)	0.285499	0.212814	1.341544	0.1913

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Pengambilan kesimpulan :

1. jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig < 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya H_a diterima (variabel X secara individu berpengaruh terhadap variabel Y).
2. jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $Sig > 0,05$ maka H_0 diterima, artinya H_0 diterima (variabel X secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel Y).

Dari hasil uji di atas diketahui bahwa:

- a. Nilai Prob X1 $0,00 < 0,05$, maka terdapat pengaruh signifikan PDRB terhadap PAD di Sumatera Utara.
- b. Nilai Prob X2 $0,79 > 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh signifikan pajak daerah terhadap PAD di Sumatera Utara.
- c. Nilai Prob X3 $0,19 > 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh signifikan retribusi daerah terhadap PAD di Sumatera Utara.

b. Uji Simultan

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah semua variabel bebas secara bersama sama mempengaruhi variabel terikat. Untuk lebih jelasnya hasil uji tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.9
Uji Simultan (F)

F-statistic	3.636294
Prob(F-statistic)	0.025831

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Hipotesis pengujian ini terdiri dari:

Ho: variabel PDRB, Pajak daerah dan Retribusi daerah secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap PAD di Sumatera Utara.

Ha: variabel PDRB, Pajak daerah dan Retribusi daerah secara simultan memiliki pengaruh terhadap PAD di Sumatera Utara.

Kriteria :

Jika nilai sig < 0,05 maka Ho di tolak

Jika nilai sig > 0,05 maka Ho di terima

Dari hasil uji di atas dapat di lihat bahwa nilai Prob (F-Statistik) sebesar $0,02 < 0,05$ maka Ho ditolak atau Ha diterima yang artinya PDRB, Pajak daerah dan Retribusi daerah secara simultan memiliki pengaruh terhadap PAD di Sumatera Utara.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang terbentuk dalam mewakili kelompok data observasi. Untuk lebih jelasnya hasil uji R^2 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.10
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.295563	Mean dependent var	17.12088
Adjusted R-squared	0.214281	S.D. dependent var	0.868920

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan hasil output tersebut dapat dilihat besarnya hubungan antara variabel PDRB, Pajak Daerah dan Distribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di lihat dari nilai R sebesar 0.295563 yang menunjukkan bahwa penerimaan PDRB, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebesar 29,55% dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah di Sumatera Utara, dan sisanya 70,45% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini.

4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen.⁴⁷ Adapun rumus yang digunakan dalam analisis ini adalah:

$$PAD = a + b_1 PDRB + b_2 PD + b_3 RD$$

Tabel IV.11

⁴⁷ Hartono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Yogyakarta: LSFK₂P, 2004), Hlm. 140.

Dependent Variable: LOG(Y)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/20/23 Time: 04:26
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22.66760	4.714397	4.808165	0.0001
LOG(X1)	-0.663219	0.206543	-3.211049	0.0035
LOG(X2)	0.030891	0.116682	0.264744	0.7933
LOG(X3)	0.285499	0.212814	1.341544	0.1913
R-squared	0.295563	Mean dependent var		17.12088
Adjusted R-squared	0.214281	S.D. dependent var		0.868920
S.E. of regression	0.770217	Akaike info criterion		2.439277
Sum squared resid	15.42410	Schwarz criterion		2.626104
Log likelihood	-32.58916	Hannan-Quinn criter.		2.499045
F-statistic	3.636294	Durbin-Watson stat		0.886829
Prob(F-statistic)	0.025831			

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat dibuat model persamaan sebagai berikut:

$$PAD = 22.667 + (-0,663PDRB) + 0,030PD + 0,285RD + 0,770e$$

1. Nilai konstanta sebesar 22.667, maka bisa di artikan bahwa jika variabel independen naik satu satuan secara rata maka variabel dependen akan menaik sebesar 22.667.
2. Nilai koefisien regresi variabel X1 bernilai -0,663 maka dapat diartikan bahwa jika variabel X1 meningkat maka variabel Y akan menurun sebesar 0,663.
3. Nilai koefisien regresi variabel X2 bernilai 0,030 maka dapat diartikan bahwa jika variabel X2 meningkat maka variabel Y akan meningkat sebesar 0,030.

4. Nilai koefisien regresi variabel X3 bernilai positif sebesar 0,285 yang berarti, jika variabel X3 meningkat maka variabel Y juga akan meningkat sebesar 0,285.
5. Standar Error yaitu angka yang menunjukkan kemampuan model untuk memprediksi variabel dependen, semakin kecil nilai standar error regresi maka semakin tepat digunakan untuk memprediksi Pendapatan Asli Daerah. Nilai Standar Error yaitu 0,770 artinya nilai ini semakin tepat.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dari hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program *Eviews* 9, maka diperoleh sebagai berikut:

Dari hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan hubungan antara PDRB, Pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan yang dilihat dari nilai R sebesar 24,51% dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah di Sumatera Utara, dan sisanya 75,49% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini.

Dari hasil penelitian sebelumnya, analisis hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (X_1) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Produk Domestik Regional Bruto secara tidak langsung dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji hipotesis dengan uji-t

diperoleh nilai prob. PDRB $0,00 < 0,05$, maka terdapat pengaruh signifikan PDRB terhadap PAD di Sumatera Utara. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Dwi Sudi Marliyanti dan Sudarsana Arka yang berjudul Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Dengan hasil yang menunjukkan bahwa “PDRB berpengaruh secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar”⁴⁸ Hal ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Chakim dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)” yang menyatakan bahwa dengan meningkatnya Produk domestik regional bruto (PDRB) maka akan menambah penerimaan daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Sehingga akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya. Jadi kesimpulannya Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap PAD.

2. Pengaruh Pajak Daerah (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Pajak daerah merupakan salah satu indikator dari PAD, dengan hasil uji hipotesis yang memperoleh hasil Nilai Prob. Pajak Daerah $0,79 > 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh signifikan pajak daerah terhadap PAD di Sumatera Utara. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Monalisah Harahap dengan penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penerimaan

⁴⁸ Dwi Sudi Marliyanti dan Sudarsana Arka, Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar, dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, Vol.3, No. 6, Juni 2014, Hlm 270.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018” dengan hasil penelitian diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $1,689913 <$ dari nilai t_{tabel} sebesar $1,69913$ artinya penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera Utara.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Mardiasmo menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan teori, dimana pajak daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena peningkatan pendapatan asli daerah yang bersumber dari peningkatan pada kelompok dana perimbangan dan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Adapun kenaikan dana perimbangan bersumber dari bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah, dana otonomi khusus dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tambahan

penghasilan guru PNS daerah, perolehan dana intensif daerah.⁴⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

3. Pengaruh Retribusi Daerah (X_3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Retribusi daerah merupakan salah satu indikator dari PAD, dengan hasil uji hipotesis yang memperoleh nilai prob. Retribusi daerah $0,19 > 0,05$ yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan retribusi daerah terhadap PAD di Sumatera Utara. Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Darwin dalam bukunya yang berjudul “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” yang menyatakan dengan retribusi daerah pengeluaran masyarakat akan bertambah, tetapi tidak akan signifikan sifatnya”⁵⁰

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Riyans Ardiansyah yang berjudul “Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” dengan hasil yaitu hipotesis kedua menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif terhadap PAD ditolak karena nilai hasil perhitungan menunjukkan (koefisien beta) negatif meskipun nilai p-value signifikan pada $0,001$.⁵¹ Hal itu terjadi karena hanya terdapat 5 dari 24 jenis retribusi yang berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, Retribusi penggantian biaya cetak kartu

⁴⁹ Monalisah harahap, Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2018, (Skripsi Institut Agama Islam Negri Padangsidempuan), Hlm 107.

⁵⁰ *Ibid.*, Darwin, Hlm. 185.

⁵¹ Riyans Ardiansyah, Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, dalam *Jurnal Ekonomika*, Vol. X, No. 2, Juni 2019, Hlm. 40

tanda penduduk, Retribusi pembuatan akta catatan sipil, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi rumah pemotongan hewan. Sementara retribusi lainnya seperti Retribusi pelayanan pasar, Retribusi izin trayek, Retribusi izin gangguan, Retribusi izin usaha perikanan, Retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Retribusi pelayanan kepelabuhan, Retribusi penerimaan alat pemadam kebakaran, Retribusi pengujian kendaraan bermotor, Retribusi pelayanan parkir, dll. Tidak berpengaruh signifikan terhadap retribusi daerah. Hal ini disebabkan karena metode pengelolaan pemungutan dan pengawasan retribusi masih sangat lemah.⁵²

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Decelina Firdha Amalia. yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil BUMD terhadap PAD di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah” dengan hasil penelitian nilai $t_{hitung} 0,060 < t_{tabel} 1,98373$ dengan nilai signifikan t sebesar 0,952 yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikan 0,05, yang berarti tidak terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan karena Masih rendahnya penerimaan retribusi yang pemungutannya belum maksimal oleh pemerintah daerah. Jadi kesimpulannya tidak terdapat pengaruh signifikan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.⁵³

⁵² *Ibid.*, Riyans Ardiansyah, Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

⁵³ Decelina Firdha Amalia, Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah (*Skrripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Anggala*)

4. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (X_1), Pajak Daerah (X_2) dan Retribusi Daerah (X_3) secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Dari hasil uji F di atas dapat dilihat bahwa nilai Prob (F-Statistik) sebesar $0,02 < 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Yang artinya variabel PDRB, Pajak daerah dan Retribusi daerah secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di Sumatera Utara. Sesuai dengan teori Pendapatan Asli Daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah keduanya merupakan variabel yang memiliki hubungan fungsional, karena PAD merupakan fungsi dari PDRB. Dengan meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan daerah untuk membiayai program-program pembangunan.⁵⁴

Menurut Warsito yang dikutip dari buku Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie yang berjudul *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, menyatakan bahwa “Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.”⁵⁵

⁵⁴ Nurul Armia Gultom, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2018, (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Padangsidimpuan),” 2020, Hlm. 3.

⁵⁵ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), Hlm. 24.

E. Keterbatasan Penelitian

Agar dapat memperoleh hasil yang baik dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan prosedur yang sesuai dengan panduan yang telah ditentukan oleh Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Namun sangat sulit untuk mendapatkan hasil yang sempurna dari penelitian ini. Beberapa keterbatasan yang peneliti rasakan dalam menyelesaikan penelitian ini, yaitu:

1. Dalam proses pengambilan data melalui BPS, sulit didapatkan data mentah sebanyak 30 sampel secara bersamaan. Karena jika data yang diambil tahun per tahun dengan tabel yang berbeda terkadang tidak sama jenis sampel yang diambil.
2. Peneliti membuat penelitian ini dengan memfokuskan pada variabel-variabel yang tertentu saja padahal banyak variabel lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.
3. Meski terdapat berbagai keterbatasan dan kesulitan dalam penelitian ini, tetapi agar tidak mengurangi makna dari penelitian ini maka peneliti tetap bersikeras melakukan penelitian ini dengan maksimal. Penelitian ini dapat terselesaikan karena kebaikan hati dengan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto secara tidak langsung dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji hipotesis dengan uji-t diperoleh nilai prob PDRB $0,00 < 0,05$, maka terdapat pengaruh signifikan PDRB terhadap PAD di Sumatera Utara.
2. Dengan hasil uji hipotesis yang memperoleh hasil Nilai Prob Pajak Daerah $0,79 > 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh signifikan pajak daerah terhadap PAD di Sumatera Utara.
3. Nilai Prob Retribusi Daerah $0,19 > 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh signifikan retribusi daerah terhadap PAD di Sumatera Utara
4. Dari hasil uji F di atas dapat di lihat bahwa nilai Prob (F-Statistik) sebesar $0,02 < 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Yang artinya variabel PDRB, Pajak daerah dan Retribusi daerah secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di Sumatera Utara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara beberapa saran yang ingin disampaikan peneliti adalah:

1. Untuk pemerintah Sumatera Utara diharapkan agar lebih memperhatikan Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam membuat kebijakan untuk kedepannya karena kemampuannya dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia dan penerimaan pendapatan daerah.
2. Untuk dunia akademik sebagai bahan untuk memperluas pemahaman dan wawasan teori.
3. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik dengan judul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pajak Daerah dan Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah” dapat menjadi referensi dan diharapkan menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.
- Damas Dwi Anggoro, "Pajak Daerah Dan Retribusi daerah," (Malang: UB Press, 2017), Hlm. 45
- Darwin, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2017.
- Edward M. Hutagalung, "Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Andalan Pendapatan Asli Daerah," Bandung: ALQAPRINT JATINANGOR, 2020.
- Moh. Farukhi, *Mengenal 34 Provinsi Indonesia: Sumatera Utara*, Surakarta: Sinergi Prima Magna, 2018.
- Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.
- Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Sadono sukirno, *Makroekonomi: teori pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Shochrul R. Ajijah, et. Al. *Cara Cerdas Menguasai EvIEWS*, Jakarta : Salemba Empat, 2011.

Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2014.

-----, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Penerbit Alfabert, 2010.

Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, Perpajakan, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.

Abdul Halim, Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju, dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Vol. 1, No. 2, 2020.

Aliman Syahuri Zein, Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, dalam Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, Vol. 6, No. 1, Januari-Juni 2018.

Bayu Rizaldi, Ahmad Guspul, Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, PDRB, Dan Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks-Karesidenan Kedu 2014-2018, dalam Journal Of Economic, Business and Engineering (JEBE), Vol. 3, No.1, Oktober 2021.

Darwis Harahap, Dkk., Analisis Kausalitas Antara Investasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara, dalam Jurnal Profjes, Vol. 1, No. 1, Juni 2022.

Delima Sari Lubis, Dkk., Pengaruh Zakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Pengentasan Kemiskinan Sebagai Variabel Moderating Di Provinsi Sumatera Utara, dalam Jurnal Profjes, Vol. 1, No. 1, Juni 2022.

Dinda Rachmah, Dkk., Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Malang 2017-2019, dalam Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa, Vol.5, No.2, November 2020.

Dwi Sudi Marliyanti dan Sudarsana Arka, Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Denpasar, dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol.3, No. 6, Juni 2014.

Himawan Yudistira Dama, Dkk., “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado”, dalam Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Volume16, Nomor 03, 2016.

Ikhwanuddin Harahap, Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara, dalam Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2018.

Nurlaila Tito Wardani dan Muchtolifah, “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Penanaman Modal Dalam Negri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Provinsi Jawa Timur” dalam Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi, Vol. 7, No. 1.

Puja Rizqy Ramadhan, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara,” dalam Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, Vol.5, No.1, 2019.

Rini Hayati Lubis, Fitriani, Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Prpvinsi Sumatera Utara Tahun 1987-2016, dalam Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2018.

Riyans Ardiansyah, Kepatuhan Wajib Pajak Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, dalam Jurnal Ekonomika, Vol. X, No. 2, Juni 2019.

Annisa Permatasari, Analisis Peranan Sektor Pertanian Dalam Perekonomian Di Kabupaten Grobogan, (Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011).

Elis Susanti, Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2015 Perspektif Ekonomi Islam, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung).

Kristina Tanan, Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja, (Skripsi Universitas Negri Makassa).

Nurul Armia Gultom, “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 1986-2018, (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Padangsidempuan 2020).

Triani dan Yeni Kuntari, “Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 Di Kabupaten Karanganyar (Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah 2016).

Badan Pusat Statistik, “Sumatera Utara Dalam Angka 2017”, (<http://sumut.bps.go.id>, diakses pada 13 Juni 2023 Pukul 20.18 WIB).

Lampiran 1

Data Pendapatan Asli Daerah (Juta Rupiah) Tahun 2017-2021

n o	Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Medan	17.380.841,05	6.362.045,15	18.296.658,82	15.098.306,71	19.065.121,89
2	Padangsidempuan	109.640.420	75.063.575	89.335.533	16.238.176,99	59.865.657,76
3	Sibolga	10.367.220	11.428.041	69.311.240	79.509.420	76.263.870
4	Mandailing Natal	80.581.688,94	84.809.923,5	98.758.815,33	90.454.777,18	14.451.514,68
5	Asahan	12.369.489,86	14.297.203,98	14.964.284,04	15.930.833,3	13.485.935,14
6	Tapanuli Selatan	10.472.261,37	13.999.628,44	16.743.086,56	13.201.012,72	13.409.342,07

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 2

**Produk Domestik Regional Bruto (Juta Rupiah)
kabupaten/Kota Di Sumatera Utara 2017-2021**

N o	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Medan	13.973.924,78	14.800.714,48	15.678.058,88	15.366.983,83	15.768.937
2	Padangsidempuan	3.830.320	4.038.930	4.261.310	4.230.410	4.346.770
3	Sibolga	3.224.590	3.393.910	3.570.330	3.521.720	3.595.700
4	Mandailing Natal	8.416.500	8.904.140	9.376.460	9.288.650	9.585.900
5	Asahan	23.525.345,7	24.844.068,1	26.245.240	26.299.570	27.279.590
6	Tapanuli Selatan	8.748.180	9.201.960	9.683.660	9.721.770	10.036.710

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 3

Data Pertumbuhan Pajak Daerah (Juta Rupiah) Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Medan	1.368.855,47	1.312.070,19	1.472.414,66	1.195.850,16	1.495.751,74
2	Padangsidempuan	15.653.315	18.389.004	18.577.289	16.238.177	17.346.867,24
3	Sibolga	9.328.680	10.394.300	11.512.430	9.712.170	11.398.530
4	Mandailing Natal	21.490.229,88	11.714.026,56	33.775.916,16	10.639.153,22	87.610.760,75
5	Asahan	37.930.651,82	42.852.881,29	55.100.685,14	59.944.433,84	69.628.893,55
6	Tapanuli Selatan	17.370.629	19.536.571	45.018.686	42.206.530	27.974.000

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 4

Data Pertumbuhan Retribusi Daerah (Juta Rupiah) Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara Tahun 2017-2021

No	Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
1	Medan	11.525.199	8.520.485	9.043.169	8.966.915	12.366.356
2	Padangsidempuan	9.044.995	9.385.099	10.226.630	8.593.294	2.258.499,98
3	Sibolga	5.006.710	5.238.860	4.841.360	4.805.170	4.246.980
4	Mandailing Natal	2.836.101	3.730.571	33.878.588	33.297.952	1.952.000
5	Asahan	5.668.242	5.859.942	7.080.357	7.845.113	6.053.178
6	Tapanuli Selatan	8.905.927	16.870.044	14.653.659	17.035.192	13.267.473

Sumber: Badan Pusat Statistik

Lampiran 5

Common Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/09/23 Time: 05:00
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	50709045	12678238	3.999692	0.0005
X1	-2.150448	0.821409	-2.617999	0.0146
X2	-0.012177	0.288687	-0.042179	0.9667
X3	1.251491	0.674749	1.854750	0.0750
R-squared	0.339752	Mean dependent var		39705197
Adjusted R-squared	0.263569	S.D. dependent var		34567467
S.E. of regression	29664260	Akaike info criterion		37.37235
Sum squared resid	2.29E+16	Schwarz criterion		37.55918
Log likelihood	-556.5852	Hannan-Quinn criter.		37.43212
F-statistic	4.459709	Durbin-Watson stat		0.840150
Prob(F-statistic)	0.011776			

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Lampiran 6

Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/09/23 Time: 05:00
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12495997	76407237	-0.163545	0.8717
X1	5.239959	7.311908	0.716634	0.4815
X2	-0.656083	0.386090	-1.699302	0.1040
X3	0.909361	0.740838	1.227476	0.2332

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.689741	Mean dependent var	39705197
-----------	----------	--------------------	----------

Adjusted R-squared	0.571547	S.D. dependent var	34567467
S.E. of regression	22626580	Akaike info criterion	36.95047
Sum squared resid	1.08E+16	Schwarz criterion	37.37083
Log likelihood	-545.2571	Hannan-Quinn criter.	37.08495
F-statistic	5.835680	Durbin-Watson stat	1.553046
Prob(F-statistic)	0.000550		

Sumber: Hasil Output Eviews

Lampiran 7

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.737839	(5,21)	0.0047
Cross-section Chi-square	22.656280	5	0.0004

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Lampiran 8

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.704930	3	0.6358

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Lampiran 9

Uji Lagrange Multiplier

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
 Null hypotheses: No effects
 Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	6.612137 (0.0101)	2.078296 (0.1494)	8.690433 (0.0032)
Honda	2.571408 (0.0051)	-1.441630 --	0.798874 (0.2122)
King-Wu	2.571408 (0.0051)	-1.441630 --	0.639744 (0.2612)
Standardized Honda	4.429866 (0.0000)	-1.284910 --	-1.333127 --
Standardized King-Wu	4.429866 (0.0000)	-1.284910 --	-1.524642 --
Gourierioux, et al.*	--	--	6.612137 (< 0.05)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Lampiran 10

Random Effect Model

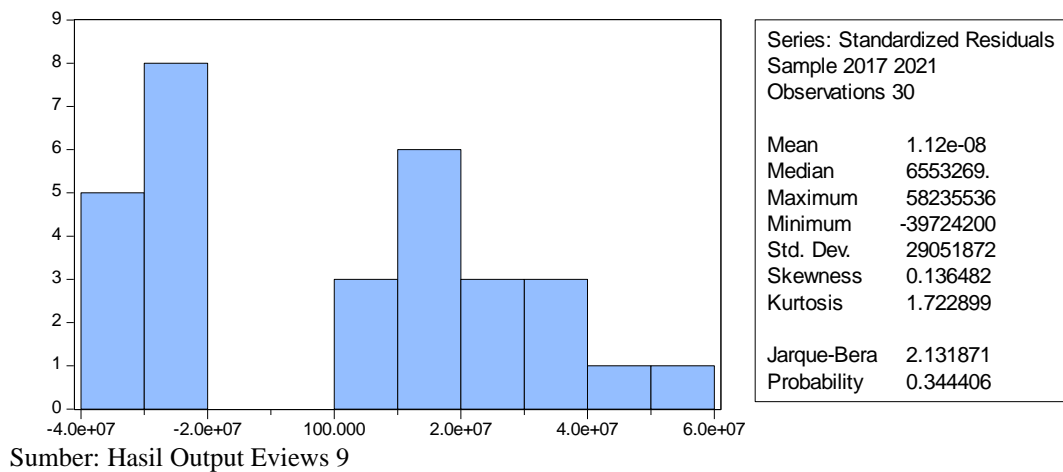
Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/09/23 Time: 05:01
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 6
 Total panel (balanced) observations: 30
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	52466505	23388090	2.243300	0.0336
X1	-1.385884	1.712809	-0.809129	0.4258
X2	-0.386874	0.318795	-1.213553	0.2358
X3	1.139041	0.684176	1.664836	0.1080

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		29022598	0.6220
Idiosyncratic random		22626580	0.3780
Weighted Statistics			
R-squared	0.245190	Mean dependent var	13071743
Adjusted R-squared	0.158097	S.D. dependent var	24037708
S.E. of regression	22055863	Sum squared resid	1.26E+16
F-statistic	2.815259	Durbin-Watson stat	1.380832
Prob(F-statistic)	0.058892		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.293661	Mean dependent var	39705197
Sum squared resid	2.45E+16	Durbin-Watson stat	0.713536

Lampiran 11

Uji Normalitas



Lampiran 12

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.295563	Mean dependent var	17.12088
Adjusted R-squared	0.214281	S.D. dependent var	0.868920

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Lampiran 13

Uji Parsial (t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22.66760	4.714397	4.808165	0.0001
LOG(X1)	-0.663219	0.206543	-3.211049	0.0035
LOG(X2)	0.030891	0.116682	0.264744	0.7933
LOG(X3)	0.285499	0.212814	1.341544	0.1913

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Lampiran 14

Uji Simultan (F)

F-statistic	3.636294
Prob(F-statistic)	0.025831

Sumber: Hasil Output Eviews 9

Lampiran 15

Hasil Analisis Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	22.66760	4.714397	4.808165	0.0001
LOG(X1)	-0.663219	0.206543	-3.211049	0.0035
LOG(X2)	0.030891	0.116682	0.264744	0.7933
LOG(X3)	0.285499	0.212814	1.341544	0.1913



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22703
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 1062/In.14/G.3/G.4c/PP.00.9/06/2022
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

24 Juni 2022

Yth. Ibu;

1. Delima Sari Lubis : Pembimbing I
2. Rini Hayati Lubis : Pembimbing II

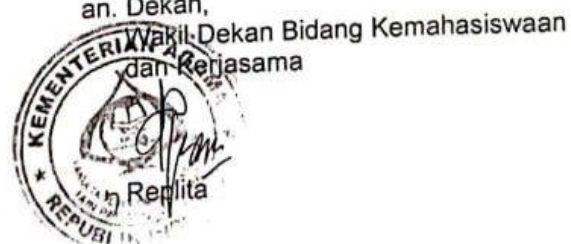
Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Ira Damayanti Harahap
NIM : 1940200075
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Sumatera Utara.

Untuk itu, diharapkan kepada Ibu bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.